

## INTISARI

Seperti wilayah kota lainnya, Kota Yogyakarta juga memiliki persoalan berkaitan dengan sampah. Sampah-sampah yang dihasilkan oleh Kota Yogyakarta diangkut menuju TPA (Tempat Penampungan Akhir) Piyungan. Pada tahun 2017, pemerintah Kota Yogyakarta nampaknya sangat serius dalam menangani persoalan sampah. Salah satunya bukti keseriusannya adalah diperolehnya penghargaan Adipura. Dalam penilaiannya, keseluruhan sistem pengelolaan sampah menjadi salah satu penilaian penting. Dengan begitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengeksplorasi sistem pengelolaan sampah yang dilakukan untuk menangani persoalan sampah di Kota Yogyakarta. Sistem pengelolaan sampah terdiri dari aspek hukum yang menjadi landasan pengelolaan sampah, aspek kelembagaan yang melakukan pengelolaan sampah, aspek teknik operasional yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan serta pembuangan akhir, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian menggunakan 5 aspek sistem pengelolaan sampah menunjukkan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan untuk menangani persoalan sampah di Kota Yogyakarta cukup baik. Kota Yogyakarta memiliki landasan hukum dalam pengelolaan sampah berupa Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah meskipun masih memiliki kekurangan berdasarkan Peraturan Kementerian nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua seksi, yaitu seksi penanganan sampah dan pengurangan sampah semakin memperjelas fungsi dan tugas organisasi. Operasional pengelolaan sampah yang terdiri dari pewadahan dan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Prosentase alokasi APBD untuk pembiayaan pengelolaan sampah selama lima tahun terakhir masih rendah, meskipun realisasi pendapatan retribusi sampah selalu melampaui target yang telah ditentukan. Adanya partisipasi masyarakat melalui Bank Sampah di tingkat RW merupakan salah satu bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Rekomendasi yang diberikan adalah 1) melengkapi atau memperbaiki Perda yang ada sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, 2) mempersiapkan lokasi TPA terbaru bila TPA piyungan tidak dapat difungsikan kembali, 3) melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan keuntungan dari pemanfaatan sampah dan pengelolaan sampah yang benar.

**Kata kunci: sistem pengelolaan sampah, hukum, organisasi, operasional, pembiayaan, partisipasi.**

## ABSTRACT

Like another urban areas, the city of Yogyakarta also has problems related to waste. The garbage produced by the city of Yogyakarta is transported to the landfills in Piyungan. In 2017, the government of Yogyakarta City seems take this very seriously in handling this matter of issue, the Adipura award is one of the proof of the seriousness of them in handling this issue. In its assessments, the whole system in managing the trash become the important assessments. Thus the purpose of this study was to find out and explore the waste management system carried out to deal with waste problems in the city of Yogyakarta. The system of waste management is consist of legal aspects as a based of waste management , intuitional aspects that carry out waste management ,operational aspects which include storage, collection, transfer, transportation, processing and final disposal, financing aspects and aspects of participate of the community itself.

This study uses qualitative research methods with a type of case study research. Method of the collection data uses, observation, interview, and documentation. The source of data comes from primary data and secondary data. The result of this research using 5 aspects of waste management show that the waste management is handling the trash in Yogyakarta City is quite good. The city of Yogyakarta has a legal foundation in waste management in the form of regional regulation Number 10 of 2012 concerning Waste Management even though it still has shortcomings based on Minister of Home Affairs (Permendagri) Regulation number 33 of 2010 concerning Guidelines for Waste Management. The waste management sector of Yogyakarta City environment office is divided into two sections, such as waste handling and waste reduction section, which further clarifies the function and the task of organization. Waste management operation is consist of storage, collection, transportation and final disposal. The percentage of APBD allocation for financing waste management over the past five years is still low, even though the realization of waste management retribution revenue always exceeds the predetermined target. With the existence of community in participation through waste management Bank at the hamlet level is one of the act of community at waste management. Recommendations given is 1) completing or improving the existing regional regulation based on permendagri number 33 of 2010, 2) preparing the new lanfills if the piyungan no longer can be function properly, 3) conducting socialization to the community about the benefits and benefits of waste utilization and management right garbage.

**Key word: waste management system, legal, organizational, operational, financing, participation**